



## MENAKAR KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH DESA: *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI FAKTOR PENENTU

Zain Amiiru Bani Rahmat<sup>1</sup>, Warsito Kawedar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas  
Diponegoro.

\*Korespondensi: [zainamiiru@gmail.com](mailto:zainamiiru@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 204 mahasiswa aktif Universitas Diponegoro yang berdomisili di desa melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, keadilan, dan daya tanggap yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Sementara itu, akuntabilitas, transparansi, dan *rule of law* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.

**Kata kunci:** Kepercayaan masyarakat, *Good governance*, Pemerintah desa.

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of good governance on public trust in village governments. Based on the principles of accountability, transparency, responsiveness, public participation, rule of law, and justice. This study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis with the SPSS application. The study utilizes primary data collected from 204 active students of Diponegoro University residing in villages through the distribution of questionnaires. The results of the study indicate that community participation, justice, and responsiveness have a positive and significant effect on public trust in village governments. Meanwhile, accountability, transparency, and the rule of law do not have a significant effect on public trust in village governments.*

**Keywords:** Public trust, *Good governance*, Village government.



## PENDAHULUAN

Sebagai entitas sektor publik, pemerintah melakukan tugasnya dalam menyediakan dan mengelola kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih dibarengi dengan praktik korupsi. Meningkatnya pemberitaan terhadap dugaan korupsi dianggap dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rudolph & Rahn, 2000). Gordon (2000) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah merupakan hal yang penting bagi aparatur pemerintah karena memberi dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa desa berwenang mengelola pemerintahan dan kepentingan warganya secara mandiri. Desa yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat berkontribusi secara esensial dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui peranan pemerintah desa. Pemberian hak otonomi tersebut juga dibarengi dengan penerimaan dana desa, yakni alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat bagi setiap desa yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun, kebijakan tersebut dikhawatirkan membuka lahan praktik korupsi serta penggunaan anggaran yang inefisiensi dalam pengelolaan keuangan desa (Sofyani et al., 2022). Pemberian hak otonomi bagi desa dan cukup besarnya jumlah dana desa yang diterima meningkatkan peluang terjadinya penyelewengan dalam pengelolaannya. Berdasarkan data yang bersumber dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat serangkaian kasus korupsi di sektor desa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya ada pada tahun 2023 dengan 187 kasus yang merugikan negara sekitar Rp162.26 miliar. Hal tersebut dapat menghalangi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan



pembangunan desa yang pada akhirnya membuat masyarakat kecewa dan tidak percaya kepada pemerintah desa. Selain itu, pelayanan kurang baik dari pemerintah desa juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

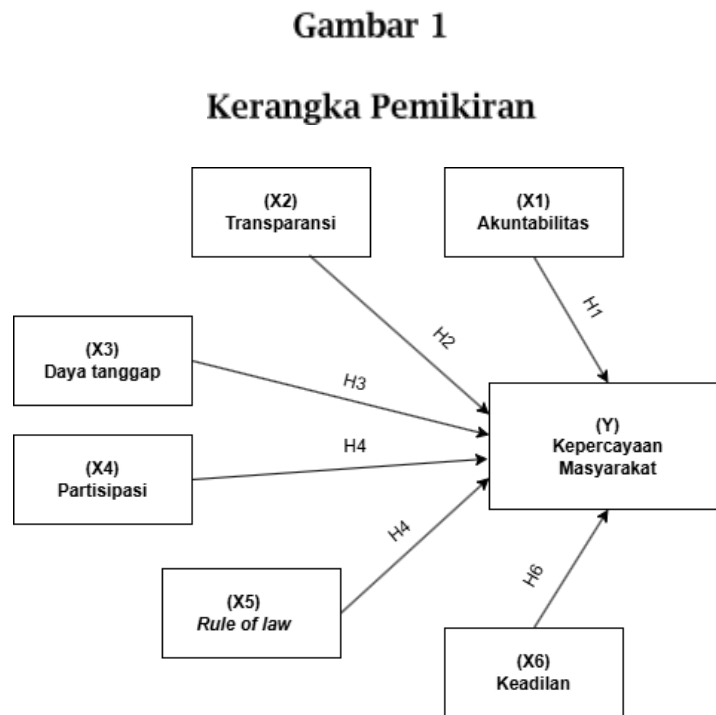
Beshi & Kaur, (2020a) berpendapat bahwa untuk menerapkan kebijakan secara efektif, penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di semua tingkat pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Oleh sebab itu, praktik *good governance* (tata kelola yang baik) perlu diimplementasikan di tingkat desa. *Good governance* diperlukan guna mencegah terjadinya praktik korupsi, seperti mengelola dana desa dengan baik untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Beshi & Kaur, (2020a), (2020b); Mansoor, (2021); Yousaf et al., (2015) implemementasi tata kelola yang baik diyakini mampu membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Isu korupsi oleh pemerintah desa yang masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia menjadi masalah yang seharusnya bisa segera untuk terselesaikan. Pengaplikasian *good governance* oleh pemerintah desa diharapkan menjadi solusi permasalahan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dengan menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan keadilan. Mengacu pada penjelasan tersebut peneliti memilih untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen pada analisis ini yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), daya tanggap (X3), partisipasi (X4), *rule of law* (X5), dan keadilan (X6). Lalu variabel dependen pada analisis ini yaitu kepercayaan masyarakat (Y). Berdasarkan uraian tersebut kemudian

dibuat kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Data primer diolah, 2025.

### **Populasi dan Sampel**

Shukla (2020) menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan semua objek yang mempunyai atribut yang selaras dengan variabel yang dianalisis, serta dari populasi tersebut temuan bisa digeneralisasi. Populasi pada analisis ini yaitu seluruh mahasiswa aktif Universitas Diponegoro. Penentuan sampel menerapkan *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria tertentu, sehingga data yang didapatkan lebih representatif dan sesuai tujuan penelitian. Kriteria yang dimaksud yaitu mahasiswa aktif Universitas Diponegoro yang berdomisili dari wilayah administratif desa yang ada di seluruh Indonesia.

### **Jenis dan Sumber Data**

Pada analisis ini jenis data yang diterapkan yaitu data kuantitatif. Sumber data primer analisis ini diperoleh langsung dari hasil survei kepada responden.



### Teknik Pengumpulan

Analisis ini menerapkan metode penyebaran kuesioner secara daring melalui *Google form* kepada responden guna mengumpulkan data. Kuesioner dibagikan kepada 207 responden, yakni mahasiswa aktif Universitas Diponegoro yang berdomisili di wilayah administratif desa.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dukungan perangkat lunak SPSS 26 untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis ini, serangkaian uji statistik juga dilakukan, termasuk validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji statistik t, uji statistik f, serta uji koefisien regresi. Semua uji bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan secara statistik valid dan hasilnya dapat diinterpretasikan secara ilmiah.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis ini, responden yang diperoleh dari kuesioner yang sudah disebar berjumlah 207 orang. Namun, setelah melalui tahap validasi data hanya 204 kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut. Terdapat 3 kuesioner yang terdeteksi sebagai outlier dalam uji statistik.

Tabel 1

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B	Beta	t	Sig.
Constant	0,830		0,540	0,580
Akuntabilitas (X1)	-0,070	-0,063	-0,872	0,384
Transparansi (X2)	0,840	0,048	0,710	0,478
Daya Tanggap (X3)	0,247	0,202	2,766	0,006
Partisipasi (X4)	0,249	0,214	3,055	0,003
Rule of Law (X5)	0,327	0,121	1,706	0,090
Keadilan (X6)	0,585	0,380	5,577	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah:

$$Y=0,830 - 0,070X_1 + 0,840X_2 + 0,247 X_3 + 0,249 X_4 + 0,327 X_5 + 0,585 X_6 + e$$

Berdasarkan persamaan ini bisa diartikan jika tidak ada variabel independen maka nilai dari kepercayaan masyarakat sebesar 0,830. Kemudian, untuk setiap kenaikan satu variabel transparansi, daya tanggap, partisipasi, rule of law, dan keadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat masing-masing sebesar 0,840; 0,247; 0,249; 0,327; 0,585. Namun, untuk kenaikan satu variabel akuntabilitas akan menurunkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,070.

### **Akuntabilitas**

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan akuntabilitas tidak berpengaruh pada kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Hasil uji statistik t mengindikasikan nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0,872 yang mana  $<$  nilai t tabel sebesar 1,972 dan nilai  $p > 0,05$  (Sig. T = 0,730  $>$  0,05) yang berarti akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, **H1 ditolak**.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Beberapa contoh upaya memberikan pertanggungjawaban tersebut adalah membuat laporan realisasi APB Desa, memberikan pertanggungjawaban pada penyelenggaraan program yang tidak berjalan sesuai rencana, menggunakan uang desa sesuai dengan peruntukannya. Upaya pertanggungjawaban tersebut mungkin kurang optimal atau hanya dianggap sebagai upaya formalitas atau pemenuhan atas aturan dan prosedur dan tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Faktor lainnya mungkin juga disebabkan karena adanya beberapa tindakan korupsi yang dijalankan oleh oknum pemerintah desa (pemdes). Hal ini mendasari ketidakpercayaan masyarakat atas apa yang sudah dipertanggungjawabkan pemerintah desa. Ketika harapan masyarakat desa pada pemdes tidak terpenuhi mereka akan mulai tidak percaya pada pemerintah desa yang selanjutnya melemahkan legitimasi mereka.

Temuan analisis ini tidak sejalan dengan penelitian Beshi & Kaur (2020a); Mansoor (2021); Nurhatika & Deviani (2023); Yousaf et al., (2015) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, analisis ini relevan dengan Sofyani et al., (2022) serta hasil analisis dari Arianti & Deviani, (2024) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

### **Transparansi**

Hasil hipotesis kedua membuktikan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Temuan uji statistik t membuktikan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 0,710 yang mana  $<$  nilai t tabel sebesar 1,972 dan nilai  $p > 0,05$  (Sig. T = 0,478  $>$  0,05) yang berarti transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, **H2 ditolak**.

Dalam konteks pemerintahan desa, informasi yang jelas dan mudah di akses oleh warga desa untuk mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa berusaha menerapkan transparansi dengan menyampaikan informasi terkait kinerja mereka melalui berbagai macam media. Namun, strategi tersebut belum sanggup untuk memperoleh kepercayaan dan memenuhi harapan masyarakat desa. Hal ini mungkin disebabkan anggapan masyarakat bahwa apa yang mereka sampaikan hanya sebatas formalitas (menaati aturan atau prosedur). Faktor lainnya mungkin dapat disebabkan oleh penyampaian informasi yang tidak optimal dan pemerintah desa yang kurang memberi kesempatan pada masyarakat untuk meninjau proses pembangunan yang sedang berjalan, Di tambah lagi, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi untuk menguatkan penyampaian informasi menjadikan akses informasi terbatas. Oleh karena itu harapan masyarakat tentang pemerintah desa yang transparan tidak terpenuhi dan tidak meyakinkan masyarakat.

Temuan analisis ini bertentangan dengan Beshi & Kaur (2020a); Mansoor (2021); Sofyani et al., (2022); dan Yousaf et al., (2015) memberikan bukti transparansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Begitu juga dengan Nurhatika & Deviani, (2023) dan Suhardi et al., (2023) yang membuktikan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan analisis ini juga tidak sejalan dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Deegan (2019). Hal ini didasarkan pada perolehan dari penelitian, di mana organisasi (pemerintah desa) dipandang oleh masyarakat desa belum mampu beroperasi sesuai dengan norma-norma sehingga tidak memperoleh legitimasi dan juga kepercayaan, meskipun sudah berupaya dengan menjadi organisasi yang transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

### **Daya Tanggap**

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Temuan uji statistik t mengidnikasikan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,766 yang mana  $>$  nilai t tabel sebesar 1,972 dan nilai  $p < 0,05$  (Sig. T = 0,006  $<$  0,05) yang berarti daya tanggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, **H3 Diterima**.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa (pemdes) dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Beragam upaya dilaksanakan oleh pemdes guna mencapai hal tersebut, seperti dengan menjadi organisasi yang terbuka pada masukan dan kritik dari masyarakat serta menyediakan pelayanan yang optimal. Hasil dari upaya tersebut adalah pemdes yang memahami kebutuhan masyarakat dan memberi pelayanan yang tepat dan cepat, Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah desa telah beroperasi sesuai dengan harapan mereka dan norma-norma yang ada sehingga menciptakan rasa percaya masyarakat pada pemerintah desa sebagai organisasi yang responsif. Oleh karena itu, analisis ini selaras dengan

dengan teori legitimasi menurut Deegan (2019) dimana organisasi akan berupaya untuk beroperasi sesuai norma sosial yang berlaku untuk memenuhi harapan masyarakat untuk memperoleh legitimasinya, salah satu strateginya dengan menjadi responsif kepada masyarakat

Temuan analisis ini relevan dengan temuan analisis ((Beshi & Kaur, 2020a; Mansoor, 2021; Yousaf et al., 2015) yang menyatakan daya tanggap berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal yang diharapkan masyarakat dari pemerintah adalah pemerintah yang responsif, di mana mereka memperoleh jawaban atas permintaan mereka.

Selain itu, penelitian Arianti & Deviani (2024), dan Nurhatika & Deviani (2023) menunjukkan hasil yang sejalan di mana daya tanggap berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat yang selanjutnya menguatkan legitimasi pemerintah desa.

### **Partisipasi**

Hasil pengujian hipotesis keempat mengisyaratkan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Temuan uji statistik t mengindikasikan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,055 yang mana  $>$  nilai t tabel sebesar 1,972 dan nilai  $p < 0,05$  (Sig. T = 0,003  $<$  0,05) yang berarti partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, **H4**

### **Diterima.**

Temuan analisis ini relevan dengan hasil analisis He & Ma, (2021) dan Suhardi et al., (2023) yang menunjukkan hasil partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat esensial guna memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan, khususnya terkait penggunaan anggaran. Hal tersebut menjadikan penggunaan uang desa lebih terarah dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Partisipasi dipandang sebagai salah satu upaya dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diimpelentasikan agar masyarakat

merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan, seperti dalam mengelola dana desa

Berdasarkan teori legitimasi organisasi akan beroperasi sesuai dengan kerangka norma sosial yang berlaku dan memenuhi harapan masyarakat dapat memperoleh serta mempertahankan legitimasinya (Deegan, 2019). Organisasi yang pada hal ini yaitu pemerintah desa berupaya guna melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, seperti contohnya dengan melibatkan mereka dalam musyawarah. Hal ini membuat masyarakat memandang bahwa pemerintah desa beroperasi sesuai dengan norma sosial yang ada dan memenuhi harapan mereka tentang organisasi yang terbuka dan inklusif sehingga masyarakat memberikan kepercayaan mereka pada pemerintah desa dan pada akhirnya pemerintah desa memperoleh kembali legitimasinya.

### ***Rule of Law***

Hasil pengujian hipotesis keempat mengisyaratkan bahwa *rule of law* tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa (pemdes). Temuan uji statistik t membuktikan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,706 yang mana  $<$  nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,972 dan nilai *p-value*  $>$  0,05 yakni sebesar 0,090 yang berarti *rule of law* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, **H5 ditolak**.

Temuan analisis ini tidak relevan dengan (Beshi & Kaur, 2020b; Nurhatika & Deviani, 2023; Yousaf et al., 2015) yang menyatakan *rule of law* berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. *Rule of law* yang diartikan sebagai adanya kerangka hukum yang adil dan tanpa memihak. Dalam penerapannya di pemerintahan desa, prinsip *rule of law* dicontohkan dengan adanya peraturan yang ditegakkan secara efektif, keputusan yang dibuat tanpa

campur tangan pihak lain, dan tidak mengambil alih hak warga tanpa kompensasi. Namun, pada akhirnya berbagai upaya penerapan prinsip *rule of law* tersebut masih belum mampu menguatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.

Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa penegakan kerangka yang hukum yang tidak memihak dan adil, tidak secara serta merta menjamin bahwa pemerintah desa melakukan tindakan yang akan memenuhi harapan dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Masih adanya kasus korupsi yang terjadi menjadi cerminan bahwa keberadaan kerangka hukum yang adil dan tidak memihak hanya sebatas hiasan serta upaya penegakan hukum secara efektif tersebut hanya sebatas formalitas atau pencitraan. Oleh sebab itu, bisa dikatakan temuan analisis ini tidak searah dengan teori legitimasi (Deegan, 2019) yang menyatakan bahwa organisasi akan beroperasi sesuai norma yang berlaku untuk memenuhi harapan masyarakat dan memperoleh legitimasinya, salah satunya ialah menjasi organisasi yang menegakkan peraturan.

### **Keadilan**

Hasil pengujian hipotesis keenam mengisyaratkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Hasil uji statistik t membuktikan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,577 yang mana  $>$  nilai t tabel sebesar 1,972 dan nilai  $p < 0,05$  (Sig. T = 0,000  $<$  0,05) yang mengindikasikan variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, **H6 diterima** .

Hasil analisis ini searah dengan Lee (2021), Ma et al. (2024), dan Zhi et al., (2022). Persepsi keadilan sosial mendorong individu untuk melepaskan sikap protektif mereka, mendorong keramahan, dan mengurangi diskriminasi, prasangka, dan konflik sosial yang selanjutnya memicu penerimaan dan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menguatkan legitimasinya. Salah satu



upaya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan bagian dari tugasnya. Pemerintah desa akan mendukung masyarakat untuk memperoleh kesejahterannya dengan berbagai cara, seperti memberikan kebebasan menyampaikan aspirasi, memberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan, serta pendistribusian manfaat. Hal tersebut membentuk persepsi masyarakat bahwa pemerintah desa telah bekerja secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat yang kemudian memenuhi harapan mereka. Hal ini kemudian menciptakan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah desa yang pada akhirnya menguatkan legitimasi pemerintah desa.

Hasil analisis ini juga searah dengan teori legitimasi di mana untuk memperoleh legitimasinya organisasi akan berusaha beroperasi sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dan kemudian memenuhi harapan masyarakat melalui berbagai cara (Deegan, 2019). Salah satu caranya adalah dengan menjadi organisasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat secara adil guna memperoleh dan meningkatkan kesejahterannya. Hal ini menumbuhkan penerimaan dari masyarakat karena organisasi beroperasi sesuai dengan harapan mereka sehingga menciptakan rasa percaya yang selanjutnya menguatkan legitimasi organisasi.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh *good governance* yang dalam hal ini adalah akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, partisipasi, *rule of law*, dan keadilan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Sesuai hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Terdapat tiga variabel

*good governance* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap



kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, yakni daya tanggap, partisipasi, dan keadilan. Sebaliknya, terdapat tiga variabel yang tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan *rule of law*. Hal ini memberikan implikasi bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa tidak cukup dibangun hanya melalui kewajiban administratif, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dan hubungan sosial yang lebih kontekstual.

### KETERBATASAN DAN SARAN

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara sistematis, masih terdapat beberapa keterbatasan perlu dipertimbangkan untuk penelitian di masa mendatang. Beberapa keterbatasan tersebut meliputi Jumlah sampel yang terbatas yakni 204 mahasiswa Universitas Diponegoro yang didominasi oleh berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, Beberapa variabel independen yang diteliti pada analisis ini, yakni akuntabilitas, transparansi, dan *rule of law* dirasa masih kurang mampu untuk menjadi faktor yang membentuk kepercayaan masyarakat. Selain itu, kuesioner yang kurang terperinci dan disebarakan secara daring memungkinkan terjadinya bias pada jawaban responden.

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah diungkapkan di atas, penelitian selanjutnya diharapkan untuk: memperluas jangkauan sampel, terkhususnya sampel dari daerah di luar Pulau Jawa sehingga dapat memperoleh data yang komprehensif dan representatif terhadap keseluruhan populasi. Selain itu, mengeksplorasi variabel independen lain agar diketahui adakah faktor lain yang bisa membentuk atau menguatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Kemudian, menjelaskan secara rinci makna dan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner yang digunakan secara daring guna meminimalisir potensi bias dalam jawaban responden.

### DAFTAR RUJUKAN



- Arianti, D. Y., & Deviani, D. (2024). Pengaruh Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat: Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 17-28. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1143>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020a). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337-350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020b). The Mediating Role of Citizens' Satisfaction on the Relationship between Good Governance Practices and Public Trust in Ethiopian Local Government. *Journal of Accounting*, 7(1), 106. <https://doi.org/10.1163/21983534-00701005>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307-2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Gordon, M. T. (2000). Public trust in government: The US media as an agent of accountability? *Sciences, International Review of Administrative* 66(2), 297-310. <https://doi.org/10.1177/0020852300662006>
- Han, Y., Aryal, N., & Hwang, K. (2024). Local governments' accountability and public trust in Nepal: Does participation make a difference? *Asia Pacific Policy Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.1002/app5.387>
- He, A. J., & Ma, L. (2021). Citizen Participation, Perceived Public Service Performance, and Trust in Government: Evidence from Health Policy Reforms in Hong Kong. *Public Performance and Management Review*, 44(3), 471-493. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1780138>
- Lee, Y. (2021). Government for Leaving No One Behind: Social Equity in Public Administration and Trust in Government. *SAGE Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211029227>
- Ma, Y., Ma, B., Yu, L., Ma, M., & Dong, Y. (2024). Perceived social fairness and trust in government serially mediate the effect of governance quality on subjective well-being. *Scientific Reports*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-67124-4>



- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Nurhatika, N., & Deviani, D. (2023). Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1528-1543. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1082>
- Rudolph, T. J., & Rahn, W. M. (2000). *The Origins and Consequences of Public Trust in Government: A Time Series Analysis* Author (s): Virginia A. Chanley, Thomas J. Rudolph and Wendy M. Rahn Source: *The Public Opinion Quarterly*, Vol. 6. 64(3), 239-256.
- Shukla, S. (2020). Concept of population and sample. *How to Write a Research Paper*, June, 1-6. [https://www.researchgate.net/publication/346426707\\_CONCEPT\\_OF\\_POPULATION\\_AND\\_SAMPLE](https://www.researchgate.net/publication/346426707_CONCEPT_OF_POPULATION_AND_SAMPLE)
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18 (3), 397-418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-20200070>
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business* 7 , (4), 1050-1060. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648>
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2015). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001>
- Zhi, K., Tan, Q., Chen, S., Chen, Y., Wu, X., Xue, C., & Song, A. (2022). How Does Social Security Fairness Predict Trust in Government? The Serial Mediation Effects of Social Security Satisfaction and Life Satisfaction. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph19116867>